



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

	v
	xi
1. Tujuh Tahun UU KIP, Akankah Zero Sengketa?	1
2. Badan Publik Berkewajiban Beri Informasi Akurat	7
3. Sekolah Tak Boleh Beratkan Masyarakat	11
4. Transparansi Produk Halal bagi Masyarakat	15
5. Transparansi Dana Desa	17
6. Penggunaan Bantuan Parpol Harus Transparan	19
7. Publik Berhak Mengakses Info Penataan Malioboro	23
8. Pemenuhan Akses Informasi bagi Buruh Migran	25
9. Optimalisasi Peran PPID	29
10. Open Data Membangun Kepercayaan pada Badan Publik	33
11. Hak Informasi Penyelenggaraan Pemilu Harus Cepat	35
12. Masyarakat Punya Hak Akses Informasi Publik	39
13. Kewarganegaraan Pejabat Berhak Diakses Publik	43
14. Badan Publik Wajib Sediakan Informasi Ganti Untung	45
15. Seleksi Perangkat Desa Wajib Terbuka	49
16. Publik Berhak Akses Informasi Kasus Siyono	51
17. Tanah Kas Desa Rawan Dimanipulasi	53
18. Informasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Wajib Diumumkan	55
19. Laporan Harta Kekayaan Kepala Daerah Wajib diumumkan	59
20. Informasi Peredaran Miras Wajib Diumumkan	63

21.	Buka Info Publik Efektif Cegah Korupsi	65
22.	Dana Keistimewaan Mestinya Terbuka	67
23.	Hak Angket DPR tentang e-KTP Tak Sesuai UU KIP	69
24.	Badan Publik Wajib Pro Aktif Menyampaikan Informasi	71
25.	Warga Terdampak Berhak Mengetahui Proses Pembangunan Hotel	73
26.	Komisi Informasi Daerah Lakukan Uji Keterbukaan	77
27.	Sekolah Perlu Buka Informasi	81
28.	Pemerintah Harus Perhatikan Kebijakan Publik	83
29.	Majelis Komisioner Hentikan Sengketa Informasi Bandara	85
30.	Informasi Berita Acara Penyelidikan (BAP) Wajibkah Dibuka?	89
31.	Cakada Wajib Umumkan Dana Kampanye	93
32.	Publik Berhak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah	95
33.	Tanda terima SPT Tahunan Sebagai Informasi Terbuka	97
34.	Info Jalur Kemacetan Cegah Korban Jiwa	99
35.	Keterbukaan Tingkatkan Kepercayaan	103
36.	Monev Badan Publik	107
37.	Hak Publik Atas Informasi Kematian Udin	109
38.	Keterbukaan Informasi Bandara Baru	113
	DAFTAR PUSTAKA	117

-00000-